



**PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA**



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (REVISI KE-2)

2025



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **62** /KPN.W4-U5/SK.RA1.10/XI/2025

TENTANG

REVISI KE-2 (DUA)

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Revisi Ke-3 (Tiga) Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 Nomor 1037/KPN.W4-U5/RA1.10/XI/2025 tanggal 7 November 2025;
2. Bahwa untuk mendorong tercapainya target kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025;
3. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi Ke-2 (Dua) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

- 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
 15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-2 (DUA) RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan dokumen yang memuat rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Kedua : Setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 10 November 2025

↳ KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, ↳

MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

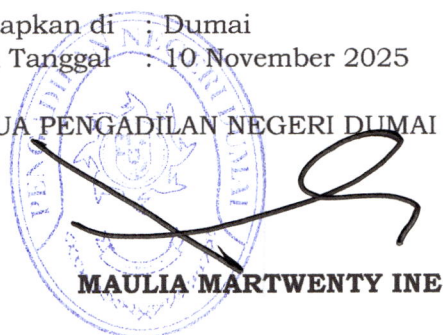
- 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
 15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-2 (DUA) RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan dokumen yang memuat rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Kedua : Setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 10 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80%	80%	80%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	75%	75%	75%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	93%	93%	93%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	28%	28%	28%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18%	18%	18%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	94%	94%	94%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	96%	96%	96%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	99%	99%	99%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu								
1.	Registrasi dan administrasi perkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	90.335.000
2.	Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP), seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, dan E-Berpadu	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Penyusunan rencana waktu pelaksanaan sidang (<i>court calendar</i>)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Penetapan hari sidang	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	660.000
5.	Pelaksanaan persidangan perkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	15.120.000
6.	Penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	300.000
7.	Minutasi perkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	11.730.000
8.	Peningkatan efektifitas penggunaan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan (non-litigasi) atau <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i> , seperti mediasi, diversi, dan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
9.	Konsinyering percepatan penyelesaian perkara	√	√	√	√	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
10.	Penyusunan laporan penyelesaian perkara	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
11.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis data dan digital, seperti Monitoring Implementasi SIPP (MIS)	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.2.	<i>Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</i>								
1.	Monitoring minutasi perkara	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Monitoring penandatanganan salinan putusan	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Penyediaan/pengiriman salinan putusan	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	30.000
4.	Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan surat tercatat sebagai sarana penyediaan/pengiriman salinan putusan	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan/pengiriman salinan putusan	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
1.3.	<i>Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</i>								
1.	Monitoring penerimaan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	70.000
2.	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Penyusunan laporan penyelesaian pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan upaya hukum tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan upaya hukum tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
6.	Pengiriman berkas perkara upaya hukum	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.4.	<i>Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</i>								
1.	Monitoring penerimaan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
2.	Pengiriman salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	150.000
3.	Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Penyusunan laporan penyelesaian pengiriman salinan putusan	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengiriman salinan putusan upaya hukum tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
6.	Pengiriman berkas perkara upaya hukum	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.880.000
1.5.	<i>Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</i>								
1.	Digitalisasi dokumen putusan	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Penyusunan laporan penyelesaian unggahan putusan	√	√	√	√	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengunggahan putusan	√	√	√	√	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata								
1.	Registrasi permohonan eksekusi	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sesuai biaya proses perkara
2.	Pelaksanaan <i>aanmaning</i> dan mendorong pelaksanaan eksekusi secara sukarela	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sesuai biaya proses perkara
3.	Penelaahan dokumen dan <i>resume</i> permohonan eksekusi secara cepat dan akurat	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Penyusunan rencana waktu pelaksanaan eksekusi	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Koordinasi keamanan pelaksanaan eksekusi	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sesuai biaya proses perkara
6.	Pelaksanaan eksekusi	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sesuai biaya proses perkara
7.	Penyusunan laporan penyelesaian eksekusi	√	√	√	√	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
8.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian eksekusi	√	√	√	√	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif								
1.	Identifikasi dini terhadap perkara yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
2.	Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Penyusunan laporan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Peningkatan kompetensi dalam penanganan perkara pidana berbasis keadilan restoratif	√	√	√	√	Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
6.	Sosialisasi terkait penyelesaian perkara pidana berbasis pendekatan keadilan restoratif	-	√	-	-	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi								
1.	Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sesuai biaya proses perkara
2.	Optimalisasi peran mediator baik Hakim maupun Non-Hakim	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Mendorong penggunaan kaukus	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Penyusunan laporan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi	√	√	√	√	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian mediasi perkara perdata	√	√	√	√	Laporan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
6.	Peningkatan kompetensi mediator dalam penyelesaian sengketa	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
7.	Sosialisasi manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara perdata	-	√	-	-	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.9.	<i>Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi</i>								
1.	Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Optimalisasi pendampingan dan kesepakatan perdamaian	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Penyusunan laporan penyelesaian perkara anak melalui diversi	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
4.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian diversi perkara anak	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
5.	Sosialisasi manfaat diversi dalam penyelesaian perkara anak	-	√	-	-	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.10.	<i>Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court</i>								
1.	Sosialisasi penyelesaian perkara perdata secara elektronik	-	√	-	-	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
3.	Monitoring dan evaluasi penggunaan e-Court secara berkala	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)								
1.	Sosialisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik	-	√	-	-	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Monitoring dan evaluasi penggunaan e-Berpadu secara berkala	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)								
1.	Sosialisasi layanan perkara pidana secara elektronik	-	√	-	-	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
2.	Optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	√	√	√	√	Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-
3.	Monitoring dan evaluasi penggunaan e-Berpadu secara berkala	√	√	√	√	Laporan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,9	3,9	3,9

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
2.1.	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan</i>								
1.	Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
2.	Monitoring dan evaluasi indeks kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
3.	Tindak lanjut hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
4.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	√	√	√	√	Unit	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.001.543.000

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
5.	Peningkatan kualitas manajemen operasional dan kinerja	√	√	√	√	Layanan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	7.290.717.000
6.	Pos bantuan hukum	√	√	√	√	Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	36.000.000
7.	Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan perkara pidana	-	√	-	√	Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	750.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	79	79	79
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87	87	87
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87	87	87
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	97	97	97
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	85	85
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,2	3,2	3,2

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
3.1.	<i>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</i>								
1.	Peningkatan kualifikasi Pendidikan aparatur	√	√	√	√	Orang	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
2.	Peningkatan kompetensi aparatur	√	√	√	√	Orang	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
3.	Peningkatan kinerja aparatur	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
4.	Peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
5.	Pemutakhiran data kepegawaian aparatur	√	√	√	√	Kegiatan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan								
1.	Penyusunan dan revidi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala	√	√	√	√	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
2.	Percepatan penyelesaian tagihan pihak ketiga (kontraktual)	√	√	√	√	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
3.	Pembatasan revisi DIPA	√	√	√	√	Kegiatan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
4.	Pengelolaan dan percepatan penyelesaian kontrak	√	√	√	√	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
5.	Penyelesaian capaian output secara akurat dan tepat waktu	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
6.	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran								
1.	Penyusunan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang realistis dan konsisten dengan target <i>output</i> (minimalisir deviasi)	√	√	√	√	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
2.	Pembatasan revisi yang berdampak pada perubahan target <i>output</i>	√	√	√	√	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
3.	Penggunaan standar biaya keluaran secara optimal tanpa mengurangi kualitas <i>output</i>	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
4.	Monitoring dan evaluasi rencana, pelaksanaan, dan capaian <i>output</i> kegiatan dan anggaran	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan								
1.	Penatausahaan barang milik negara	√	√	√	√	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
2.	Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengelolaan aset	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
3.	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN)	-	√	-	-	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
4.	Pemanfaatan barang milik negara	√	√	√	√	Laporan	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-
5.	Dokumen kepemilikan barang milik negara	√	-	-	-	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		I	II	III	IV				
6.	Penetapan status penggunaan barang milik negara	-	√	-	-	Dokumen	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-

Dumai, 10 November 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



MAULIA MARTWENTY INE